

RENCANA AKSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2022



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANJARBARU

1. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- 3) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6);

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru, sebagai salah satu lembaga teknis Pemerintah Kota Banjarbaru, memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Misi Kesatu Pemerintah Kota Banjarbaru, yaitu : **“Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia”**.

Dari misi kesatu tersebut, pencapaian tujuan yang didukung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru adalah “**Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya**” dengan sasaran “**Meningkatnya toleransi beragama, Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat**”. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan strategi Meningkatkan Kewaspadaan, Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial serta arah kebijakan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan secara selaras sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Kegiatan SAKIP merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan pula sebagai pelaksanaan dari Kebijakan Pemerintah Kota Banjarbaru bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru Tahun 2022

2. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan SAKIP adalah membantu SKPD dalam mencapai akuntabilitas sehingga dihasilkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Tujuan kegiatan adalah agar seluruh Pelaksana Program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru menerapkan akuntabilitas dalam melaksanakan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya. Kegiatan ini telah direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru melalui Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kinerja yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

- a. Output kegiatan adalah laporan hasil pelaksanaan SAKIP per triwulan (4 laporan), laporan hasil Program dan Kegiatan per bidang Laporan Kinerja (1 laporan).

- b. Outcome (hasil) yang direncanakan dari kegiatan ini adalah persentase rekomendasi perbaikan komponen pengungkit dan komponen hasil yang ditindak lanjuti dengan target 100 (jumlah kegiatan yang dilaksanakan dan ditindak lanjuti : Jumlah Kegiatan x 100%.
- c. Sasaran (kinerja) adalah persentase Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan dan Politik Kota Banjarbaru.
- d. Tujuan (dampak) adalah meningkatnya SAKIP di Badan Kesatuan dan Politik kota Banjarbaru untuk menunjang SAKIP Pemerintah Kota Banjarbaru dengan target Pemko Banjarbaru mendapat predikat A (predikat dari Kementerian PAN dan RB).

3. Waktu Pelaksanaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru melaksanakan Program dan Kegiatan selama 12 Bulan rata rata kegiatan dilaksanakan dari bulan Januari dan seterusnya sampai bulan Desember 2022

4. Anggaran

Dana kegiatan SAKIP / Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Banjarbaru untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp 6.686.412.673,- (Enam Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

5. Personil sesuai kompetensi

Kegiatan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/ PPTK dan PPK dengan Koordinasi Kepala Bidang untuk dipertanggungjawabkan kepada Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru. yang memiliki pengetahuan dan kompetensi tentang SAKIP.

6. Rencana Pelaksanaan

Dalam melaksanakan kegiatan SAKIP, dilakukan persiapan sebagai berikut

- a. Pembuatan SK Tim SAKIP
- b. Melakukan rapat intern dengan pejabat struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c. Mempersiapkan data untuk melaksanakan kegiatan.
- d. Mempersiapkan kelengkapan administrasi (RKA).
- e. Membuat Surat Keputusan (SK) Kepala Badan untuk panitia pelaksana (jika diperlukan)
- f. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait pelaksanaan kegiatan .
- g. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan kepada kepala kesbangpol.
- h. Lain- lain yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Metode yang digunakan adalah dengan cara :

- a. Melakukan koordinasi ke bidang-bidang selaku pelaksana teknis kegiatan
- b. Melakukan rapat/ pertemuan dengan semua Kabid dan PPTK
- c. Melakukan Evaluasi/ memonitoring program dan kegiatan yang dilaksanakan

Adapun hambatan yang mungkin akan dihadapi yaitu :

- a. Pemangku kepentingan pada bidang-bidang/PPTK kurang aktif membantu pemenuhan dokumen.
- b. Tertunda kegiatan tidak sesuai jadwal disebabkan terkendala oleh kegiatan dan jadwal masing-masing instansi, sehingga tidak menutup kemungkinan tertundanya kegiatan.

RENCANA AKSI TAHUN 2022
BADAN KESBANGPOL KOTA BANJARBARU

RENCANA AKSI											
No	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				KETERANGAN	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		
1	Meningkatnya penguatan dan pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase potensi paham radikal yang diselesaikan	100%	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6	7	8	9	10	11
					Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Dokumen	TW I TW II TW III TW IV	
							2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 kali	TW I TW II TW III TW IV	
								Jumlah Pembinaan pada Veteran dan Janda Veteran	101 Orang	TW I TW II TW III TW IV	
								Jumlah penerima Santunan T ali Asih	3500 Orang	TW I TW II TW III TW IV	
								Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan	5 kali	TW I TW II TW III TW IV	
							3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 kali	TW I TW II TW III TW IV	
							4	Pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	72 kali	TW I TW II TW III TW IV	

2	Meningkatnya partisipasi peran partai politik dalam pendidikan politik, Pengembangan Etika Budaya Politik Serta Pemantauan masyarakat	Persentase peran partai politik dalam Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Budaya Politik	100%	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kembangan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kembangan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah sosialisasi pendidikan politik	3 kali	TW I TW II TW III TW IV	1 1 1 1
								Jumlah Partai Politik yang mendapatkan bantuan bibah	9 Parpol	TW I TW II TW III TW IV	1 9
						2	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kembangan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah koordinasi pendidikan politik	6 kali	TW I TW II TW III TW IV	1 2 3 -
						3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kembangan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Monitoring dan evaluasi situasi politik	6 kali	TW I TW II TW III TW IV	1 1 2 2

3	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang aktif	80%	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1	Pelaksanaan kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah sosialisasi keormasan	3 kali	TW I TW II TW III TW IV	- 3 - -
4	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase fasilitasi / pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100%	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah monitoring dan evaluasi keormasan	20 kali	TW I TW II TW III TW IV	2 5 5 8
							Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah sosialisasi PAGN dan FKUB	5 kali	TW I TW II TW III TW IV	- 5 - -
							Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	7 kali	TW I TW II TW III TW IV	3 3 1 -

5	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik Ipotek sosbud Hankam yang ditangani	100%	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah sosialisasi/ bimtek kewaspadaan	1 kali	TW I TW II TW III TW IV	- - 1 -	18
							Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah koordinasi kewaspadaan dini	13 kali	TW I TW II TW III TW IV	1 5 5 5	
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Monitoring dan evaluasi kewaspadaan dini	24 kali	TW I TW II TW III TW IV	12 12 - -	
							Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Monitoring dan evaluasi kewaspadaan dini	24 kali	TW I TW II TW III TW IV	12 12 - -	

NO	KEGIATAN	BULAN											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Monev SAKIP												
	Triwulan I												
	Triwulan II												
	Triwulan III												
	Triwulan IV												

RENCANA DAN ANGGARAN TAHUN 2022

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	3.727.307.849,-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	2 Dokumen	15.000.000,-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Pembangunan SKPD Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	2 Dokumen	20.000.000,-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	2.421.522.821,-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD Yang Disusun Diakhir Tahun Sesuai Ketentuan	1 Laporan	5.000.000,-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD Yang Disusun Secara Berkala Sesuai Ketentuan	20 Laporan	64.144.500,-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Yang Tersedia	3 Jenis	4.600.000,-
Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	6 Jenis	105.996.000,-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan Yang Tersedia Jumlah Barang Cetakan Yang Tersedia	25600 Lembar 1 Jenis	15.500.000,-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan atau buku peraturan yang tersedia	1133 EKS	5.100.000,-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Yang Dilaksanakan	27 Laporan	100.760.000,-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik & Lainnya Yang Dapat Digunakan	1 Jenis	25.200.000,-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor Lainnya	2 Orang	19.200.000,-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan/Jabatan Yang Terasilitasi Pajak & Dipelihara	1 unit	41.979.000,-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Terfasilitasi Pajak & Dipelihara	12 Unit	76.192.852,-
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	2 Unit	2.000.000,-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan & Mesin Lainnya Yang Dipelihara	30 Unit	20.850.000,-
Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan & Mesin Lainnya Yang Dibeli	4 Unit	50.000.000,-
Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana & Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dibangun	1 Paket	214.110.000,-
Pengadaan Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dibangun	1 Paket	10.000.000,-
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Potensi Paham Radikal yang diselesaikan	100 %	559.054.500,-
Penyusunan Program Kerja Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebnagsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	3 Dokumen	35.000.000,-
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pembinaan Pada Veteran Dan Janda Veteran	101 Orang	226.854.500,-
	Jumlah Penerima Santunan Tali Asih	3500 Orang	
	Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional Yang Dilaksanakan Jumlah Sosialisasi Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Bela Negara	5 Kali 3 Kali	
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Koordinasi Ideologi Wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Revolusi Mental	3 Kali	207.200.000,-
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Monitoring Dan Evaluasi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Revolusi Mental	72 Kali	90.000.000,-

Program Peningkatan Peran partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	1.809.732.000,-
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepada Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Partai Politik Yang Mendapatkan Bantuan Hibah	9 Parpol	1.605.058.000,-
	Jumlah Sosialisasi Pendidikan Politik	3 Kali	81.925.000,-
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepada Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Koordinasi Pendidikan Politik	6 Kali	75.000.000,-
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepada Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Monitoring Dan Evaluasi Situasi Politik	6 Kali	47.740.000,-
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Yang Aktif	85%	115.000.000,-
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Jumlah Monitoring Dan Evaluasi Keormasan	20 Kali	55.000.000,-
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	Jumlah Sosialisasi Keormasan	3 Kali	60.000.000,-

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pasilitasi / Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100%	405.480.000,-
Pelaksanaan koordinasi Di Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat kepercayaan di Daerah	Jumlah Koordinasi Fasilitasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	7 Kali	345.480.000,-
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	Jumlah Sosialisasi P4GN Dan FKUB	5 Kali	60.000.000,-
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Potensi Konflik Ipolek Sosbud Hankam Yang Ditangani	100%	580.000.000,-
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	Jumlah Sosialisasi/ Bimtek Kewaspadaan Dini	1 Kali	30.000.000,-
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Koordinasi Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Banjarbary, Penanganan Konflik Sosial Dan FKDM	13 Kali	500.000.000,-
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	Jumlah Monitoring Dan Evaluasi Kewaspadaan Dini	24 Kali	50.000.000,-
			5.562.799.968,-

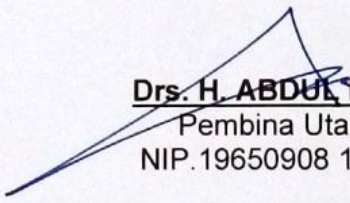
7. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi dilakukan setiap menjelang dan setelah kegiatan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan hambatan hambatan tidak terlaksananya kegiatan.

8. Pelaporan

Laporan dibuat secara tertulis oleh bidang bidang yang dihimpun oleh PPTK SAKIP berisi tentang kemajuan dan hambatan berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan SAKIP sesuai dengan capaian target yang sudah dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan pada akhir tahun dibuat laporan kinerja sebagai pertanggung jawaban kegiatan (laporan kinerja).

KEPALA BADAN,



Drs. H. ABDUL MALIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19650908 198702 1 002